

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN
DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*CONCURRCUS REALIS*)
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013**

TESIS

Oleh:

**SUHARDI
2002190097**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBARENGAN
DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*CONCURRCUS REALIS*)
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program
Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**SUHARDI
2002190097**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Suhardi
NIM : 2002190097
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrus Realis*) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Juni 2023





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Oleh

Nama : Suhardi
NIM : 2002190097
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrucus Realis*) Studi Kasus Putusan MA Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 19 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr.dr. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDN/NIDK: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr.Armunanto Huzaharani, S.E., S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 150677/8986240022

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr.Wiwik Sri Widiarto, S.H., M.H.
NIDN:0327096505

Direktur

Prof. Dr.dr. Bernadetha, M.Pd., PA.
NIDN: 0320116402





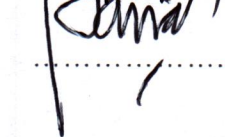
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 19 Juni 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Suhardi
NIM : 2002190097
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrucus Realis*) Studi Kasus Putusan MA Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Paraf
Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.	Ketua	
Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 19 Juni 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhardi
NIM : 2002190097
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrucus Realis*) Studi Kasus Putusan MA Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut ialah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan jika saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola berbentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2023



Suhardi
2002190097

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karuniaNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrus Realis*) Studi Kasus Putusan MA Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013”. Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir penulis dan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Tesis serta bertujuan memperoleh gelar Magister Hukum pada program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari seringkali menghadapi halangan dan kendala dan menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, masih ada kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun dengan kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan selama belajar di program studi Hukum UKI. Penulis banyak dibantu hingga diberikan arahan, semangat dan dukungan oleh orang-orang disekitar penulis selama pembuatan tesis ini. Olah karen itu, dengan ketulusan dan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis.
3. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis.

4. Prof. Dr. dr. Bernadetha, M. Pd., PA. Selaku Direktur PPs UKI yang mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH.,MH selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku penguji sidang tesis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum dan seluruh staff PPs Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis di hari-hari yang akan datang.
7. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 MH UKI yang selalu memberikan dukungan positif dan kesempatan untuk maju berkarya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Ayahanda Sejo dan Ibunda tercinta Mujiasih, yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang menjadi motivasi dalam penyelesaian tesis ini, Semoga Allah SWT memberi balasan setimpal atas segala jasa-jasa kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata harapan penulis semoga hasil tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.

Jakarta,

2023

Suhardi

2002190097

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.	6
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konsep.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian.....	11
1.5.2 Spesifikasi Penelitian.....	12
1.5.3 Metode Pendekatan.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5 Metode Analisis dengan Penyajian	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan teori.....	15
2.1.1 Teori Keadilan.....	15
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Teori Kepastian Hukum.....	16

2.1.4	Teori Pemidanaan.....	19
2.2	Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	20
2.2.1	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	22
2.2.2	Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	23
2.3	Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.3.1	Bentuk Bentuk Pidana Korupsi.....	31
2.3.2	Unsur unsur Tindak Pidana Korupsi.....	33
2.4	Pencucian Uang.....	34
2.4.1	Varian Pencucian Uang.....	38
2.4.2	Cara Mencegah Pencucian Uang.....	38
2.5	Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang.....	39
2.6	Penyidikan.....	40
2.6.1	Aparat Penyidik.....	43
2.6.2	Proses Penyidikan.....	47
2.6.3	Kesalahan Dalam Proses Penyidikan.....	59
2.6.4	Fungsi dan Sifat Penyidikan.....	60
2.7	Berita Acara Penyidikan.....	67
2.7.1	Istilah dan Dasar Hukum Berita Acara Penyidikan.....	68
2.7.2	Isi Berita Acara Penyidikan.....	72
2.7.3	Macam Macam Berita Acara Penyidikan.....	75
2.7.4	Pemberkasan / Penyerahan BAP.....	77
2.7.5	Fungsi Berita Acara Penyidikan.....	83

BAB III PENEGAKAN HUKUM POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PT. ASKRINDO.....		85
3.1	Hukum mengenai Penyidikan.....	85
3.2	Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	87
3.3	Peranan Polisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di PT. ASKRINDO.....	92

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	105
4.1 Kasus Pidana Korupsi dan Pencucian Uang PT ASKRINDO.....	105
4.1.1 Posisi Kasus Pidana Hukum yang menjerat ERVAN FAJAR MANDALA.....	105
4.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	119
4.1.3 Salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.32/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., tanggal 22 Oktober 2012.....	120
4.1.4 Permohonan Banding.....	122
4.1.5 Mengadili.	126
4.2 Analisis Yuridis.....	127
4.2 Analisis Dakwaan.....	151
4.2.1 Menyebutkan Waktu dan Tempat Tindak Pidana itu dilakukan.....	153
4.2.2 Pasal Delik yang dilanggar.....	153
4.2.3 Alat Bukti.	155
4.3 Analisis Tuntutan.....	155
4.4 Analisis Putusan.....	155
4.4.1 Pertimbangan dan Vonis Hakim.....	156
4.4.2 Analisis Kasus.....	158
BAB V PENUTUP.....	160
a. Kesimpulan.....	160
b. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA.....	162

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak pada hancurnya harapan masyarakat di kota ataupun pedesaan, selain bisa mempengaruhi daya saing dan kemajuan bangsa. Korupsi sangat berhubungan dengan kekuasaan, melalui penyalahgunaan kekuasaan, berakibat pada perkembangan korupsi tidak mudah diberantas, karena penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak teratur, tidak tertib dan tidak terawasi dengan baik, bahkan kelemahan sistem *check and balances* diantara ketiga kekuasaan pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadikan korupsi membudidaya. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengesahkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta Kepolisian terhadap Penyidikan Tindak Pidana korupsi ialah merupakan usaha yang ditempuh untuk penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen dan kemampuan tinggi dibutuhkan oleh penegak hukum seperti penyidik dan institusi Polri ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan supaya kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri lebih optimal, hal ini disebabkan belum optimalnya penegakkan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara terutama mengenai penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan gambaran serta masukan mengenai penyidikan dalam tindak pidana korupsi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder sebagai data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adanya peran tersangka ERVAN FAJAR MANDALA sebagaimana dibahas sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1621 K/Pidsus/2013. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau pasal 3 UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyidik.

ABSTRACT

Corruption is a crime that has an impact on destroying people's hopes in cities or rural areas, besides being able to affect the competitiveness and progress of the nation. Corruption is closely related to power, through abuse of power, resulting in the development of corruption which is not easily eradicated, because the arrangement of the government administration system is not regular, orderly and not properly supervised, even the weakness of the system of checks and balances among the three government powers (legislative, executive and judiciary) makes corruption entrenched. In the context of eradicating criminal acts of corruption, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes has been promulgated. The participation of the Police in Investigating Corruption Crimes is part of the efforts taken in efforts to uphold the law in eradicating criminal acts of corruption. It requires high capability and commitment from law enforcers, in this case investigators and Polri institutions, in carrying out investigations and investigations in such a way that the implementation of the eradication of corruption by the Police can be carried out more optimally, because the enforcement of Corruption Crimes committed by the Police is still not optimal. Police Law Enforcement Officers. The purpose of this research is to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law no. 20 of 2001 in conjunction with Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. For the development of science, to provide an overview and input regarding investigations into criminal acts of corruption by the police. This research uses normative juridical research which only uses secondary data as data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The role of the suspect ERVAN FAJAR MANDALA as properly regulated in the Supreme Court decision Number: 1621 K/Pidsus/2013. Because the unlawful act has been proven to fulfill the elements as stipulated in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and/or Article 3 of RI Law No.15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes as amended by RI Law No. legally and convincingly committed the crime of corruption together with the crime of money laundering.

Keywords: Corruption Crimes, Money Laundering Crimes, Investigators.